

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Oleh

ARIF MARWAN HAMID

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang cenderung naik di provinsi Lampung. Peningkatan kasus menuntut penyelesaian upaya pencegahan TPPO. Pemerintah provinsi Lampung menugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) provinsi Lampung dalam urusan kebijakan pencegahan TPPO. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi program kebijakan pencegahan TPPO yang dilaksanakan oleh DPPPA provinsi Lampung.

Penelitian ini dilaksanakan di DPPPA, BP3PMI dan perwakilan masyarakat penerima program provinsi Lampung. DPPPA melaksanakan pencegahan TPPO melalui rapat koordinasi gugus tugas dan sosialisasi kepada perangkat daerah di kabupaten/kota provinsi Lampung. Analisis data dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat indikator yaitu komunikasi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, komunikasi terjalin dengan pihak internal DPPPA dan semua pihak pada struktur satuan gugus tugas (satgas) pencegahan dan penanganan TPPO secara jelas, namun konsistensi intensitas komunikasi masih terbatas. Kedua, sumber daya manusia dan anggaran di DPPPA belum mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi di seluruh kota/kabupaten dan koordinasi antarlembaga dalam satgas TPPO. Ketiga, pada sikap pelaksana DPPPA, telah ada upaya memberikan pengetahuan berupa pelatihan terkait kerja pencegahan TPPO, yang memberikan pengetahuan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan TPPO. Keempat, struktur birokrasi pencegahan TPPO DPPPA adalah dengan pembentukan satgas pencegahan dan penanganan TPPO. Pada satgas tersebut, bagian pencegahan TPPO telah melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan BP3PMI. Namun DPPPA dalam pencegahan ini belum memiliki *standard operating procedure* (SOP).

Kata kunci: implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, pencegahan perdagangan orang.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PREVENTION PROGRAM FOR THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING (TPPO) (A Study at the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Lampung Province)

By

ARIF MARWAN HAMID

This research is motivated by the increasing trend of human trafficking (TPPO) cases in Lampung Province. The rise in cases demands effective preventive measures against TPPO. The provincial government of Lampung has assigned the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) of Lampung Province to handle policy matters related to the prevention of TPPO. The purpose of this study is to examine the implementation of TPPO prevention policy programs carried out by the DPPPA of Lampung Province. This study was conducted at DPPPA, BP3PMI, and representatives of program beneficiaries in Lampung Province. DPPPA implements TPPO prevention through task force coordination meetings and socialization programs with regional government agencies in Lampung's districts and municipalities. Data analysis is based on Edward III's theory of policy implementation, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive qualitative. The findings of the study show that, first, communication has been established clearly within DPPPA and with all parties in the structure of the TPPO prevention and handling task force (Satgas), although the consistency and intensity of communication remain limited. Second, human resources and the budget in DPPPA are insufficient to conduct socialization activities in all districts/municipalities and to coordinate effectively among institutions within the TPPO task force. Third, regarding the disposition of DPPPA implementers, efforts have been made to provide training and knowledge related to TPPO prevention work, which serves as support in the implementation of prevention policies. Fourth, the bureaucratic structure of TPPO prevention in DPPPA is established through the formation of a TPPO prevention and handling task force. In this task force, the prevention unit has involved relevant regional government organizations, namely the Education Office, the Manpower Office, and BP3PMI. However, this prevention task force has not yet developed a standard operating procedure (SOP).

Keywords: Policy implementation, communication, resources, disposition, Bureaucratic structure, Human trafficking prevention.